



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TELUK
WONDAMA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TELUK
BINTUNI**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI)
(II)**

J A K A R T A

RABU, 3 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Wondama
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Bintuni

PEMOHON

- Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay (Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021)
- Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy (Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Teluk Wondama
- KPU Kabupaten Teluk Bintuni

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 14.07 – 15.51 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Elysa Auri
2. Fery Michael Deminikus Auparay

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Demianus Waney
2. Karto Nainggolan
3. Leumes Piet Wondiwoy
4. Heru Widodo
5. Ridwan Darmawan

C. Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Berthy Leleulya
2. Monika Elsy Sanoi
3. Yulian Bensior Madiowi

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Justinus Tampubolon

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendrik Syake Mambor
2. Andarias Kayukatui

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Handri Piter Poae
2. Frengky Ever Wambraw
3. Pither Ponda Barany
4. Suwempy Sivrit Suoth
5. Dian Farizka
6. Daniel Bangsa

G. Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ali Ibrahim Bauw
2. Yohanis Manibuy

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

Dhimas Pradana

I. Termohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eko Priyo Utomo
2. Regina Baransano
3. Ganem Seknun

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

Petrus Kasihw

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Derek Loupatty
2. Rahmat Taufit
3. Cosmas E. Refra
4. La Ode Musrifin
5. Zainuddin Patta

L. BAWASLU:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Menahen J. Sabarofek | (Kab. Teluk Wondama) |
| 2. Muhammad Naziel Hilmie | (Kab. Teluk Wondama) |
| 3. Lenny Kabra | (Kab. Teluk Wondama) |
| 4. Epianus Rawar | (Kab. Teluk Wondama) |
| 5. Daud D. Balubun | (Kab. Teluk Bintuni) |
| 6. Supiah Tokomadoran | (Kab. Teluk Bintuni) |
| 7. Rudi Horenius Baru | (Kab. Teluk Bintuni) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini AC-nya terlalu dingin, harus lebih panas ini. Semakin dingin, semakin bahaya. Apalagi enggak ada ventilasinya.

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada sidang terdahulu. Durasi persidangan sebisa mungkin dipersingkat karena sangat berbahaya kalau terlalu lama. Kemudian, tadi saya sudah menyinggung ini terlalu dingin, itu juga berbahaya, supaya bisa lebih dipanaskan.

Baik, silakan, memperkenalkan diri, Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: DEMIANUS WANNEY

Izinkanlah saya untuk menyampaikan daftar nama kehadiran dalam sidang yang terhormat ini. Sidang yang diikuti saat ini dalam luring, saya Demianus Waney, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan Saudara Karto Nainggolan, S.H. selaku Kuasa Hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: DEMIANUS WANNEY

Sedangkan dalam daring, hadir:

1. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.
 2. Leumes Piet Wondiwoy, S.H.
 3. Elsy Auri, S.E., M.M. selaku Prinsipal.
 4. Fery Michael Deminikus Auparay, Prinsipal, dan
 5. Saudara Ridwan Darmawan, S.H. selaku Kuasa Hukum.
- Demikian, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di persidangan, Prinsipal atas nama Yohanis Manibuy dan Kuasanya saya sendiri, Dhimas Pradana. Sedangkan untuk sidang online, hadir Prinsipal atas nama Ali Ibrahim Bauw. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.
Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara luring, saya Daniel Tonapa Masiku, Kuasa Hukum. Kemudian ada Komisioner, Bapak Berthy Leleulya. Kemudian secara daring, hadir Pimpinan KPU RI bersama Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Bapak Paskalis Semunya, ada Komisioner Pak Norbertus, Pak Abdul Halim, dan ada Sekretaris, Bapak Michael Mote. Kemudian, hadir juga Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama, Ibu Monika Elsy Sanoi, Bapak Yulian B. Madiowi bersama sekretaris, Bapak Henry Jackson. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Termohon Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, hadir dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon KPU Teluk Bintuni, Daniel Tonapa Masiku dan saya sendiri,

Justinus Tampubolon. Dan juga hadir Komisioner KPU Teluk Bintuni atas nama Bapak Eko Priyo Utomo. Secara daring, ada Ketua KPU Teluk Bintuni, Bapak Herry Arius E. Salamahu dan Divisi Program dan Data, Ibu Reggina Baransano, dan juga Sekretaris KPU Teluk Bintuni, Bapak Ganem Seknun. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk persidangan saat ini secara luring yang hadir saya sendiri, Handri Piter Poae sebagai Kuasa Hukum dan rekan saya Suwempy Sivrit Suoth, S.H. Dan secara daring, hadir Prinsipal kami, Ir. Hendrik Syake Mambor bersama dengan Drs. Andarias Kayukatui. Dan bersama dengan Kuasa Hukum juga Frengky Ever Wambraw, Daniel Bangsa, Pither Ponda Barany, dan Dian Farizka. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 hadir saya sendiri, Rahmat Taufit. Di sebelah kiri saya, Derek Loupatty. Serta hadir juga Prinsipal secara daring, yaitu Bapak Ir. Petrus Kasiuw dan Kuasa Hukum juga hadir, Cosmas E. Refra, La Ode, sama Zainuddin Patta, S.H.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Bawaslu Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021? Bawaslu Teluk Wondama?

16. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya dari Bawaslu Teluk Wondama. Yang hadir secara luring saya Menahen Sabarofek (Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Koordinator Divisi HPPS). Saya

didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Papua Barat, Muhammad Naziel Hilmie. Yang hadir secara daring, hadir juga Kordiv SDM Bawaslu Teluk Wondama, Ibu Lenny Kabra dan Koordinator Divisi Pengawasan, Epianus Rawar.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Bawaslu Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kabupaten Teluk Bintuni, siapa yang hadir?

18. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan ini, saya Daud Daniel Balubun selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan didampingi oleh rekan saya, Saudara Rudi Baru (Kordiv Sengketa). Dan yang mengikuti daring adalah rekan kami Ibu Supiah Tokomadoran, dan didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan juga Ketua Bawaslu RI. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Jadi, pada awal persidangan dan sidang terdahulu, saya minta menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Dokumen sudah diterima oleh semua pihak, sehingga apa yang tidak dibacakan dalam persidangan ini dianggap telah dibacakan, bisa me-refer pada dokumen yang tertulis dan buktinya, ya.

Baik, kita mulai dari Termohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 terlebih dahulu. Silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung saja.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

Komisi Pemilihan Umum Teluk Wondama yang diwakili oleh Monika Elsy Sanoi (Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama), dalam hal ini memberi Kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, Vinsensius Ranteallo, Justinus Tampubolon, Vitalis Jenarus, Kristian Masiku, Yulius Satto Masiku, Gregi Mario Pada, dan seterusnya.

Yang Mulia, kami langsung pada Eksepsi di halaman (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu Eksepsinya berkenaan dengan apa saja?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Eksepsi hanya satu, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Atas 2 alasan.

Yang pertama. Bahwa yang dipersoalkan atau dijadikan dalil-dalil keberatan oleh Pemohon adalah menyangkut sengketa proses.

Dan yang kedua. Pemohon sama sekali tidak mengajukan atau menjelaskan mengenai adanya selisih perolehan hasil sebagai ... sebagaimana kewenangan yang menjadi Kewenangan Mahkamah.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu alasan kami.

Kemudian, langsung pada Pokok Permohonan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pada halaman 8.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Mengenai dalil Pemohon pada poin 9 ... poin 9 dan poin 10 halaman 9. Pemohon mendalilkan bahwa akibat terdapat pemilih ganda di setiap TPS atau pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS yang mengakibatkan adanya penggelembungan suara dan merugikan perolehan suara Pemohon. Termohon secara tegas membantah hal ini, Yang Mulia. Karena proses pembahasan, dan pengesahan, penetapan daftar pemilih tetap sudah dilakukan oleh Termohon atau KPU Teluk Wondama secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ada pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, kemudian juga melibatkan tim penghubung atau LO pasangan calon ... 4 pasangan calon, terlibat dalam seluruh proses yang prosesnya dimulai dari tanggal 15 Januari 2020 pada saat KPU Teluk Wondama menerima Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan atau DP4.

Kemudian, proses selanjutnya yang penting kami sampaikan. Pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus dilakukan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan coklit.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian setelah coklit, lalu data itu kemudian diserahkan kepada TPS di 75 kampung dan kelurahan. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus dilakukan pleno TPS tingkat kampung dan kelurahan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang, intinya saya meminta klarifikasi supaya dijawab, ya. Setelah semua proses itu, dilakukan pleno di kabupaten?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Pleno itu untuk pengesahan DPT?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pengesahan DPT dan dihadiri oleh (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Seluruh saksi pasangan calon dan Bawaslu.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Kemudian, terakhir ditandatangani oleh KPU ... Termohon, ya?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Seluruh ... ditandatangani oleh Termohon, seluruh tim pendukung pasangan calon, dan Bawaslu.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan tidak ada keberatan dari setiap (...)

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang memberikan koreksi waktu itu, Yang Mulia, hanya Bawaslu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dari tim pasangan calon, tidak ada koreksi.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti mengenai DPT sudah klir, ya. Enggak ada masalah?

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Menurut kami klir, Yang Mulia. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan di (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai DPT?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di TPS ... ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah (...)

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang pertanyaan terakhir, yang dipakai menjadi dasar untuk melakukan pemilihan pilkada, itu jumlah pemilih berapa?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jum (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jumlah pemilih seluruh kabupaten. Sekarang saya tanya, ada berapa distrik atau kecamatan? Ada berapa? Itu KPU-nya pastinya hafal ini (...)

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada 13 distrik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

13 distrik.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

13 distrik di 75 kampung dan (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ... berapa TPS jadi itu? Berapa kampung, berapa TPS?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

120 TPS, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

120 TPS.

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jumlah pemilih ... warga negara yang punya hak pilih, berapa? Hafal, enggak?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di bawah 5.000 (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dikasih (...)

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung, KPU, dijawab! Berapa yang mempunyai hak pilih?

66. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

25.934.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

25.934. Ini yang punya hak pilih, ya. Jadi, yang di dalam DPT final, setelah dilakukan pemutakhiran ditemukan angka ini, ya. Betul, KPU? Dijawab, KPU, betul?

68. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu mengenai DPT sudah klir, ya? Terus yang kedua, di Teluk Wondama itu menggunakan apa? One man one vote, sesuai dengan nasional atau ada yang menggunakan ikat atau menggunakan noken? Ada, enggak?

70. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Sesuai ketentuan PKPU nasional, Pak.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti semuanya dicoblos, ya?

72. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Dicoblos. Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan lagi, diteruskan!

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami langsung pada keberatan Pemohon, jawaban kami pada halaman 10 mengenai TPS 05 Wasior II dan TPS 06 Wasior II. Ini kami bantah, Yang Mulia. Karena nama dan orang yang disebutkan dalam nomor urut itu berbeda, kalau Marten L.

Dimara di TPS 5 nomor urut 79, maka yang di TPS ... TPS 06 itu tercatat atas nama Aditya Masruli, jadi nama orang yang berbeda.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Beda, ya?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di halaman 10, halaman 11?

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Halaman 10 dan 11, jawaban.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Buktinya T-047 sampai dengan T-52?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

T-052. Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian pada poin A2, Termohon juga membantah mengenai dalil Pemohon karena nama dan orang yang berbeda juga. Yang satu namanya Kristian Menarbu, yang satu namanya Jamaludin.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi, kami membantah dalil Pemohon. Kemudian, pada TPS 05, Wa Ati itu NIK dan NKK-nya berbeda, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi, kami juga tidak mungkin menghapus nama orang yang ... dan ... apa namanya ... memang identitas kependudukannya berbeda.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, pada TPS 04 Wasior, poin B1 di halaman 12.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di situ nama dan NIK juga berbeda, Yang Mulia. Yang satu, Ika Oktovina ... Ika Oktoviana dengan NIK 9207011, NIK-nya berbeda. Kemudian, namanya juga ejaannya berbeda, Ika Oktaviana yang di TPS nomor ... nomor 132. Jadi, meskipun namanya sama, tetapi identitasnya berbeda, jadi tidak ... KPU tidak mempunyai kewenangan untuk mencoret nama tersebut.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, menyangkut dengan TPS 4 Wasior II, menurut kami dalil Pemohon kabur karena di ... di Distrik Wasior itu ada berapa TPS 09, sementara Pemohon hanya menyebutkan TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior, sementara ada beberapa TPS 09 di Distrik Wasior. Jadi, menurut kami ini kabur.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, pada C-1 TPS 05 Maniwak dan di situ nama dan NIK juga berbeda, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau satu namanya disingkat, Jeanne N. Karubaboy, sementara yang satunya Jeanne Naomi Karubaboy. Jadi, ini juga nama dan identitasnya berbeda, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik nama maupun NIK-nya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sekarang intinya, supaya mempercepat, semuanya dianggap dibacakan. Kekeliruan yang pemilih ganda, nama yang terdapat ganda, dan semuanya, dianggap telah dibacakan.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya, kesimpulannya, tidak ada ganda?

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada ganda, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang kita lanjutkan, itu juga meliputi ... apa ... TPS 10 Maniwak Distrik Wasior dan sebagainya, ya?

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu berarti sampai halaman berapa penjelasan Anda?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sampai halaman (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua dibantah, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Sampai halaman 21.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

21. Terus kemudian ... ini apa, ini? Kok di dalam halaman 21 ada Eksepsi, apa ini?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu sudah Petitem, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Berarti itu semua sudah dibantah sampai dengan halaman 21?

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu yang poin 5, coba dibacakan!

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka cukup jelas bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan, pemungutan, dan penghitungan suara, hingga penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, tim penghubung, dan saksi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan jajarannya.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sebelum dibacakan, saya minta klarifikasi. Yang pertama, pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS yang jumlahnya berapa tadi? TPS-nya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada 9 TPS, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada persoalan-persoalan?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami juga sudah jadikan bukti (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua saksi tanda tangan?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Semua saksi tanda tangan.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan di Form Kejadian Khusus, nihil.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Juga tidak ada?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada keberatan.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baru diajukan (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Gimana?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baru diajukan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten. Pada saat itu, saksi Pemohon menyatakan atau meminta agar pleno ditunda.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Saya seba ... sebelumnya, jadi di TPS itu tidak ada persoalan?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di 9 (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di semua TPS tidak ada persoalan?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada keberatan untuk 9 TPS itu, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian setelah sampai di tingkat kecamatan atau di tingkat distrik, ada persoalan?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di distrik juga tidak ada.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan calon ... anu ... Pemohon juga enggak melakukan keberatan?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada, tidak ada, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baru di tingkat kabupaten?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di tingkat kabupaten pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi, saksi Pemohon meminta agar pleno ditunda dengan alasan mereka ada membuat laporan ke Bawaslu, namun setelah diberi penjelasan oleh pimpinan rapat, akhirnya sepakat untuk dilanjutkan. Begitu, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi tidak jadi ditunda?

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ditunda.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Akhirnya setelah tidak ditunda, dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Betul, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus selesai semuanya di (...)

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Selesai pada pukul 21.26 WIT.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke itu selesai. Kemudian masih ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi itu?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi Pasangan Pemohon tanda tangan?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu jadi saksi Pemohon tidak mau menandatangani.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah diketahui hasilnya, maka Pemohon saksinya tidak tanda tangan?

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak tanda tangan di tingkat kabupaten.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa dia tidak tanda tangan? Alasannya?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena bisa langsung (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Jawab saja! Kan Anda bawa mik, langsung jawab KPU!

160. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap. Izin pim ... Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

162. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Bahwa alasan tidak bertanda tangan karena proses itu sementara dia tetap mempersoalkan yang dilaporkan ke Bawaslu.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

164. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Itu saja. Tapi terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak dipersoalkan, diterima.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, ada laporan di Bawaslu belum diproses?

166. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga mengharapkan itu ditunda dulu?

168. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Ya. Siap, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anunya ... rapat penentuan rekapitulasinya?

170. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ditunda dulu.

172. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Baik.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah nanti Bawaslu bisa merespons itu.

174. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi pada waktu hasil rekapitulasi, itu juga tidak di tasal ... Pasangan Calon Pemohon tidak tanda tangan, ya, akhirnya?

176. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Tapi menerima hasilnya.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi menerima hasil apa ... hasilnya dalam bentuk apa itu?

178. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Berita Acara rekapitulasi, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berita Acaranya ditandatangani? Enggak juga kan?

180. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Kan yang tanda tangan KPU, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu kan dia tetap mengatakan menerima atau tidak?

182. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Menerima, dia menerima dokumen Berita Acaranya, Yang Mulia. Saksinya menerima.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Tapi menerima dalam bentuknya, ya. Ya, baik. Terus kemudian dianggap oleh KPU atau oleh Termohon sudah selesai?

184. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti Bawaslu merespons itu bahwa masih ada persoalan yang menurut Pemohon belum terselesaikan. Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Berarti sekarang Petitemnya. Silakan, Kuasa Pemohon ... Kuasa Termohon!

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Petitem. Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Termohon Nomor 285 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar dan sah berdasarkan Keputusan Nomor 285 dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam bagan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang giliran Pihak Terkait, ini Saudara menyampaikan keterangan Pihak Terkait setebal ini, ya. Ini kalau dibacakan selesai hari Sabtu ini. Makanya harus disingkat, ya. Silakan!

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Siap, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Anda mengajukan Eksepsi?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ya.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa? Eksepsinya mengenai apa?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi terhadap uraian jawaban keterangan kami sebagai Pihak Terkait, kami fokus kepada Eksepsi yang pertama adalah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Yang sudah kami tuangkan pada halaman 1 sampai dengan halaman ke-11.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Itu yang pertama adalah ini pokok uraian yang pertama dalam terhadap keseluruhan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon, semestinya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan memutusnya. Hal tersebut dikarenakan terhadap dugaan pelanggaran pada 9 TPS yang berada di Distrik Wasior, Teluk Wondama, yaitu TPS 9 Wasior I dan seterusnya sampai dengan TPS 14 Maniwak, telah diperiksa dan dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atas laporannya dan ternyata tidak memenuhi unsur formil.

Kemudian yang kedua. Bersesuaian dengan seluruh bukti pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK dan seterusnya serta Model C Hasil Salinan KWK yang merupakan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara atas keseluruhan TPS-TPS yang dimaksud, semestinya sudah ditandatangani oleh para saksi di tingkat TPS, termasuk juga Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang saat ini bertindak sebagai Pemohon.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Dan sama sekali tidak diajukannya keberatan dan/atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon pada TPS-TPS tersebut.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Terhadap seterusnya, kami sudah uraikan pada halaman 1 sampai dengan yang ke-11.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Kemudian, Eksepsi yang berikutnya adalah Eksepsi terhadap Kedudukan Hukum.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Fokus kami di situ bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengkaji tidak hanya berkaitan antara lain sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi termasuk juga dengan syarat formil lainnya yang diatur dalam ketentuan PMK Nomor 6 Tahun 2020.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Dimana pada posisi itu jika ada syarat formil yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PMK tersebut, maka terhadap kedudukan Pemohon tidak mempunyai (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukan hukum?

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Terhadap uraian seterusnya kami sudah tuangkan dalam halaman 12 sampai dengan 15.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Kemudian berkaitan dengan eksepsi yang selanjutnya itu, eksepsi tentang Permohonan kabur dan tidak jelas. Di sini sangat panjang, Yang Mulia, tetapi kami sudah mempersingkat bahwa (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya?

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Meneliti dalil daripada Pemohon yang menyatakan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, yaitu dalil mereka pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, kemudian adanya daftar pemilih ganda yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua sekaligus pada TPS yang berbeda secara keseluruhan dalil dalam uraian Posita tersebut dibantah dan ditolak oleh Pihak Terkait.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran atas nama-nama yang dituangkan dalam Permohonan pada Posita angka 11 adalah berjumlah 15 orang, mulai dari Marten L. Dimara dan seterusnya itu sesuai dengan penulisan huruf dalam Permohonan Pemohon terkesan ditulis banyak nama, namun ternyata hanyalah pengulangan yang ditulis oleh Pemohon.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Kemudian terhadap nama-nama tersebut di atas, sama sekali kabur dan tidak jelas. Karena sama sekali tidak ada bukti yang akurat menguntungkan Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor Urut 4 dan hal tersebut pun menegaskan bahwa sama sekali tidak ada perselisihan perolehan suara dan/atau pelanggaran Pemohon yang menyatakan ... pelanggaran Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan, dan/atau pengurangan, dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon, atau Pihak Terkait, atau pasangan calon lainnya, sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Oleh karenanya 15 orang tersebut semestinya sangat kabur dan tidak jelas. Nyatanya juga tidak terdapat signifikan sejumlah suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat memengaruhi jumlah suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Hal yang paling menonjol yang kami kaji terhadap pemilih 15 orang tersebut, ternyata berkaitan dengan didapatinya dugaan pelanggaran pemilih ganda oleh Pemohon pada TPS-TPS yang dimaksud, kami sudah ajukan sebagai bukti. Tetapi ternyata setelah dilakukan pencermatan, pada DPT TPS-TPS tersebut keseluruhannya didapati memiliki identitas NIK yang berbeda, bahkan Pemohon sendiri tidak mencantumkan NIK dari 15 orang tersebut. Perbedaan dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti dalam administrasi kepemilukadaan mengandung arti yang berbeda orang dan/atau berbeda pemilih. Kemudian pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas dan kabur, termasuk adanya TPS-TPS yang tidak ada dalam pemungutan suara di Distrik Wasior, tetapi dituangkan oleh Pemohon.

Oleh karenanya terhadap nama-nama tersebut di atas, kami dapat klasifikasikan pelanggarannya sebagai berikut. Khusus terhadap sebagian besar nama-nama, yaitu Ike Octavina, Markus Baransano, Bagus Amy Priyono, Alfit Zuriati, Linda Rumpak, Amus M. Leiwakabessy, Yanto

Zakarias Wihyawari, Amir Kasim, dimana sama sekali Pemohon tidak mencantumkan keseluruhan NIK-nya dan setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, ternyata tidak mencoblos ganda atau kedua kali seperti dalil Pemohon. Hal tersebut sudah dipertegas dengan pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan fotokopi KTP yang bersangkutan pada saat klarifikasi dilakukan.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Dan hal tersebut masing-masing yang bersangkutan bersedia di bawah sumpah dan janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu urusannya nanti.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ya.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Sedangkan Marten Dimara, Jamaludin, Martinus Neto, Yohana Paulina Ariks, Hendrina Rumbiak, termasuk Jeane Naomi Karubaboi setelah dicermati pada DPT TPS yang disebutkan ternyata didapati memiliki identitas NIK yang berbeda.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang berbeda?

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ya.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Bahkan Pemohon juga tidak mencantumkan NIK-nya. Perbedaan dalam penulisan nama, dan berbeda dalam penulisan huruf, serta ada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas, kabur, sehingga sangat terkesan Pemohon bersembunyi di balik dalil dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan daftar pemilih ganda, yang sama sekali tidak didukung dengan fakta lapangan, tidak ada alat bukti, serta data yang akurat.

Khusus adanya pemilih yang namanya Yohana Paulina Ariks dan Hendrina Rumbiak dengan dalil dugaan pencoblosan dua kali, hal tersebut sudah berproses pada tingkatan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Yang ternyata setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, dipertegas melalui pernyataan, dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, yang bersangkutan ternyata merupakan orang yang terindikasi kuat, terafiliasi langsung dengan Pemohon, dan/atau suruhan Pemohon, dengan janji pemberian uang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan terafiliasi langsung dengan Pemohon atau suruhan Termohon. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan pada saat klarifikasi dilakukan. Dan terhadap pemilih Jeane Naomi Karubaboi terindikasi kuat merupakan orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon dan merupakan bagian daripada tim pemenangan yang selalu mengajak masyarakat untuk memilih Pemohon selaku Paslon Nomor 1.

Oleh karenanya terhadap uraian tersebut di atas, Pihak Terkaitlah sebenarnya yang dirugikan dan menjadi korban dalam hal ini. Karena ternyata ada indikasi kuat skenario kecurangan yang dibuat oleh orang-orang yang terindikasi berafiliasi langsung dengan Pemohon dan/atau suruhan Pemohon. Namun, seakan-akan Pemohonlah yang bersandiwara menyatakan bahwa mereka yang dirugikan.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Bahwa semestinya perolehan suara terbanyak yang diperoleh oleh Pihak Terkait dalam rekapitulasi perhitungan suara adalah merupakan kehendak murni masyarakat Teluk Wondama.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Oleh karena itu, bagi Pihak Terkait tidak pernah terbesit sedikit pun untuk melakukan perbuatan tercela, apa lagi Pihak Terkait merupakan calon perseorangan, calon independen yang sudah berproses hanya karena kemurahan daripada Tuhan.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Oleh karena itu, yang kelima. Dengan tidak mengabaikan bahwa dalil dugaan pelanggaran Permohonan Pemohon yang tidak didukung dengan fakta lapangan, tidak adanya alat bukti, serta data yang akurat, sangat terkesan hanya dibangun melalui argumentasi yang bersumber daripada peristiwa yang tidak bernilai, tidak relevan dengan perkara a quo, terkesan sangat spekulatif, ternyata ditemukan juga adanya ketidaksesuaian antara dalil Posita yang diuraikan oleh Pemohon dan Petitemnya. Dimana terhadap hal tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan PSU, namun dalam Petitem secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yang sudah disebutkan, yang nyata dan jelas sudah bertentangan dengan Posita adanya uraian Pemohon terjadinya dugaan pelanggaran.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitemnya langsung. Yang lain dianggap telah dibacakan.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ada satu Eksepsi lagi, Yang Mulia, yang harus kami tambahkan.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak! Apa itu?

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Yaitu berkaitan Eksepsi terhadap perubahan Perbaikan Permohonan yang kami tuangkan secara keseluruhan pada halaman 115 sampai dengan 117.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dianggap dibacakan.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ya. Kemudian dalam Pokok Permohonan yang kami tuangkan secara keseluruhan pada 118 sampai dengan 141. Uraianya sudah kami jelaskan juga (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu dianggap dibacakan.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Kemudian terhadap Petitum dan tuntutananya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan/atau sekurang-kurangnya mengabulkan salah satu Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku, serta mengikat Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada Prof. Saldi? Cukup. Baik, Yang Mulia, cukup? Cukup. Baik.

Sekarang giliran Bawaslu juga dipersingkat. Yang intinya tadi, ada ... dianggap ada laporan kepada Bawaslu dan bagaimana proses laporannya itu, silakan!

Anda punya resume, kan? Resumennya juga jangan dibacakan. Yang lainnya dianggap dibacakan. Persoalan yang menyangkut 11 TPS tadi itu, kemudian mengenai adanya pemilih ganda. Coba itu saja yang disampaikan karena kita ingin mengerti, bagaimana reaksi dari atau respons dari Bawaslu. Silakan!

246. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan resume keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Bahwa setelah membaca pokok dalil Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam kedudukan sebagai pemberi keterangan mencermati bahwa terdapat empat pokok dalil yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan dan penindakan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (...)

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang pokok dalilnya dijawab bagaimana?

248. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Yang pertama ... izin, Yang Mulia. Pokok Permohonan pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di 9 TPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, itu terdapat dalam Pokok Permohonan angka 2 (...)

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Terus jawabannya? Responsnya, gimana?

250. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Bahwa Permohonan a quo yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 12 TPS, termasuk di dalamnya 9 TPS pada Pokok Permohonan a quo dengan disertai dengan permintaan pemungutan suara ulang yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Robert Gayus Baibaba pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 20.02 WIT, dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor Laporan 07 dan seterusnya, dan diregistrasi dengan Nomor 07 dan seterusnya.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

252. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Bahwa terhadap Laporan Nomor 07, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan kajian dengan mengklarifikasi pelapor, terlapor, saksi, pengawas TPS, dan KPPS, serta memeriksa bukti dokumen keterangan mengenai kajian Laporan Nomor 07 dan seterusnya sebagaimana terdapat dalam halaman 3 sampai dengan 14 Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Adapun hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara yang terjadi di 12 TPS pada pokoknya menyimpulkan bahwa.

1. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di 10 TPS, yakni di TPS 1 Kampung Maniwak, TPS 5 Kampung Maniwak, TPS 7 Kampung Maniwak, TPS 9 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 4 Kampung Maniwak, TPS 9 Kampung Wasior I, TPS 5 Kampung Wasior II, TPS 4 Kampung Wasior (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar! Saya anu ... ini Anda sama dengan ... ini kan begini, TPS 5, TPS 7, sampai ke TPS 4 itu Kampung Maniwak, kenapa kok tidak disusun menurut urutannya? Ini 5 dulu baru 7, 9, 13, balik ke 4 lagi. Kenapa enggak disusun?

254. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Izin, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 4, 5, 7, 9, 13, gitu, kenapa?

256. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Izin, Yang Mulia, yang dijawab berdasarkan yang dilaporkan sesuai dengan kajian yang kami (...)

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, itu urutan kronologis pelaporannya?

258. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Ya.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus?

260. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Dan ternyata dari 12 TPS itu tidak terbukti.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini semuanya tidak terbukti?

262. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus?

264. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Yang kedua. Terdapat bukti yang menerangkan fakta bahwa pemilih atas nama Hendrina Rumbiak menggunakan hak pilihnya lebih

dari 1 kali di TPS yang berbeda, yaitu TPS 4 Kampung Maniwak dan TPS 10 Kampung Maniwak.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

266. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Pemilih atas nama Yohana Paulina Aris menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, yaitu TPS 7 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

268. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Permintaan pelapor untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 12 TPS, yaitu TPS 1 Kampung Maniwak, TPS 5 Kampung Maniwak, dan seterusnya.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

270. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Tidak dapat direkomendasikan ke KPU Kabupaten Teluk Wondama karena dugaan pelanggaran pemungutan suara terhadap 10 TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak terbukti dan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 2 TPS, yaitu TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak telah melewati batas waktu paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan ... tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Untuk yang pertama tidak terbukti dugaan pelanggaran?

272. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua karena melewati batas waktu?

274. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diteruskan!

276. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Berikut. Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan adanya daftar pemilih ganda bahwa Permohonan angka 2 huruf b dan angka 9. Terhadap Pokok Permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Keterangan mengenai Pokok Permohonan a quo selengkapnya sebagaimana terdapat dalam halaman 16 sampai dengan 19 Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam Perkara Nomor 32 dan seterusnya.

Bahwa terkait dengan ... bahwa terkait pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih tetap, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan pengawasan yang hasilnya, antara lain, dengan mengeluarkan Surat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor 112 dan seterusnya perihal Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Sementara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama agar dapat melihat dan meninjau kembali daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran, pencocokan, dan penelitian karena hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap DPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 ditemukan beberapa data pemilih yang teridentifikasi sebagai berikut. Data pemilih ganda, data meninggal dunia, data pindah domisili, pemilih berumur 1 sampai 16 tahun, pemilih berumur 90 sampai 116 tahun, pemilih berumur 500 sampai 1.000 tahun.

Surat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor 112 dan seterusnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan menghapus data pemilih yang terindikasi, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 676 dan seterusnya tertanggal 9

Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama dengan hasil rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap berjumlah 25.947 pemilih yang tersebar di 13 distrik, 76 kelurahan/kampung, dan 120 TPS. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPT tersebut, terdapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama berupa data ganda sebanyak 2 orang. Masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus sekarang yang nomor 3 itu dianggap dibacakan, ya. Permohonan ... terkait surat Permohonan Bawaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang. Ini akhirnya ada rekomendasi PSU? Saya tanya.

278. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Siap (...)

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada, ya?

280. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Dari laporan ini tidak ada, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Terus yang nomor 4 terkait Surat Kuasa Hukum Pemohon kepada Bawaslu perihal penegasan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Tidak ada ... jadi, tidak jadi?

282. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, tidak jadi, ya?

284. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Izin menyampaikan.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

286. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dapat menjelaskan pada tanggal 14 Desember 2020 (...)

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana (...)

288. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima surat perihal mohon penegasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dari Tim Penasihat Hukum Pasangan Calon Elysa Auri, S.E., M.M., dan Fery Michael Deminikus Auparay, S.Sos (...)

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tadinya, kan minta PSU tapi tidak jadi, sekarang penegasan.

290. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang minta penegasan ini akhirnya dijawab gimana oleh Bawaslu Teluk Wondama?

292. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Kami membalas surat daripada tim kuasa hukum, Surat Nomor 224 (...)

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mengatakan, "Pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan." Karena apa? Sudah melewati batas waktu 2 hari itu, kan?

294. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu dianggap dibacakan. Ya, jadi, minta penegasan pun sudah dijawab. Jawabannya adalah karena sudah melewati 2 hari dari tanggal diadakannya pemungutan suara?

296. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang yang terakhir, apa? Sudah selesai, kan?

298. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Ya (...)

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keterangannya (...)

300. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Izin menyampaikan, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

302. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Bahwa dari 12 TPS yang dilaporkan, ada 2 TPS yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pemilihan, mencoblos dua kali, dan ... sementara sudah ditangani dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama. Dan prosesnya sudah naik sampai ke tahap persidangan di pengadilan negeri (...)

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2 TPS yang mencoblos dua kali?

304. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Siap, benar, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di TPS mana saja?

306. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

TPS 10 (...)

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 10, mana?

308. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Dan TPS 14 Kampung Maniwak.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 14 kampungnya ... kampung apa itu?

310. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Kampung Maniwak (...)

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maniwak?

312. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Distrik Wasior (...)

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maniwak, Wasior?

314. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Kampung Maniwak, Distrik Wasior.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Maniwak, Wasior. Ini diketahui mencoblos di TPS 10 dan mencoblos di TPS 14?

316. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa namanya itu?

318. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Atas nama Hendrina Rumbiat dan Yohana Paulina Haris.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2 orang. Hendrina dan siapa?

320. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Hendrina Rumbiat dan Yohana Paulina Haris.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yohana. Baik. Sekarang sudah diproses pidananya?

322. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Siap, benar, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada putusan pengadilan?

324. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Belum. Sementara menunggu.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, dari sisi pelaksanaan pemungutan suaranya diulang, enggak, di 2 TPS itu?

326. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Yang melakukan ini 1 orang dari setiap TPS.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

328. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Karena sesuai ketentuan di dalam Pasal 112 (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena hanya 1 orang (...)

330. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

1 orang (...)

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maka tidak dilakukan PSU?

332. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Harus lebih ... benar, Yang Mulia, harus lebih dari seorang.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dari sisi pemilihannya, tidak perlu dilakukan PSU karena yang nyoblos hanya 1 orang?

334. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau 2, baru harus dilakukan PSU, kan, gitu, kan?

336. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Benar, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi masalah pidananya tetap diproses?

338. BAWASLU: MENAHEN J. SABAROFEK (KAB. TELUK WONDAMA)

Pidana tetap diproses.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih.
Ya, silakan, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bawaslu, itu berapa jumlah DPT di 2 TPS itu? Tahu, enggak? Atau KPU, berapa jumlah DPT di 2 TPS itu? Yang ada memilih lebih dari satu kali 1 orang itu. Kalau enggak, KPU saja yang jawab!

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, dicekkan! TPS 10 dan TPS 14 Maniwak, Wasior, itu jumlah pemilihnya berapa? Ditanya ini.

Oke. Bawaslu, sudah ketemu? Atau siapa yang bisa ketemu, dijawab. Kita di sini Panitia Penggantinya juga cari. Kita cari seluruhnya cepat biar (...)

342. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di TPS 14 itu total DPT-nya=293.

346. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

293.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

348. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di TPS 10?

349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sebentar, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kalau angka-angka ini susah, ya?

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau angka honor cepat, ya? Manusiawi.

Ketemu, enggak? Ya, kalau enggak ketemu, pokoknya ada di dalam bukti, ya?

352. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Ada, Pak.

353. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

249, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, 249. Jadi, 293 dan (...)

356. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

249.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

249?

358. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pertanyaan berikutnya, dari 293 di TPS 14 itu, berapa suara untuk Pemohon? Ini karena tipis-tipis, ini penting ini. Suara Pemohon berapa? Ini jangan-jangan yang menyusun staf saja ini, tidak Anggota Bawaslu yang menyusun, jadi enggak ketemu dia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini tulisannya kecil sekali, di sini sudah ketemu. Jumlah akhir TPS 10. Ya, Jef, kamu yang lebih muda, Jef, coba bacakan!

360. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

TPS 10, Pak.

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

TPS 10, berapa?

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 10.

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemohon (...)

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ini, jumlah akhir?

365. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Pemohon?

366. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

367. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

23 suara.

368. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

23 suara. Termohon?

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

370. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

41.

371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

41.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT

41.

373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau yang di TPS 14, Pemohon, berapa?

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT

34. Ya, betul, 34 itu? Ini harus ... nanti disiapkan kaca pembesar ini, Hakimnya nanti enggak kelihatan ini. 34, ya? 34, terus?

375. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Pihak Termohon=34, Pak.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan 34. Terus?

377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Termohon?

378. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

36.

379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

36, ya?

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

36.

381. TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: BERTHY LELEULYA

Pihak Terkait=36.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Pihak Terkaitnya=36?

383. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemohon=34. Pihak Terkait=36, ya?

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 34 dan 36.

385. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau yang tadi, Pemohonnya=23, Pihak Terkaitnya=41?

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT

41.

387. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini semua pasangan saksi tanda tangan semua? Petugas juga tanda tangan semua, ya?

389. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

390. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, oke. Terima kasih, Pak Ketua.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sudah, Prof? Terima kasih, ya, Bawaslu. Bawaslu juga sudah selesai, ya?

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ini untuk perkara (...)

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Mohon izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan (...)

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana ini?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Dari Pihak Terkait 32/PHP.BUP-XIX/2021.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, kenapa?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Ada hal yang harus kami klarifikasi berdasarkan keterangan tadi dari Bawaslu. Bahwa tadi itu bukan di TPS 7 dan 14, dua nama, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Jadi, nama Yohana Paulina Haris di TPS 7 dan 14. Sedangkan nama Hendrina itu di TPS yang berbeda, di TPS 4 dan TPS 10. Jadi, 2 orang ini di TPS yang berbeda semua. Jadi, hanya 1 di TPS yang berbeda. Terima kasih, Yang Mulia.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti dicek ... kita akan cek, ya? Ya. Sudah masuk di dalam Risalah Persidangan, nanti kita yang menilai, nanti kita cek kalau ada ... apa ... klarifikasi dari Pihak Terkait, ya? Baik, kita sudah selesai untuk Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang perkara yang berikutnya, Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 dimulai dari Pihak Termohon dahulu, silakan!

402. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon kabupaten ... KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021.

Pertama. Yang kami perlu sampaikan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan baik, aman, dan lancar, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Yang kedua. Kami Termohon mengajukan keberatan terhadap Perbaikan Permohonan yang dibacakan oleh Pemohon tanggal 23 Desember 2020.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa?

406. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Karena pada saat Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Januari 2021, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang baru, Yang Mulia, menurut Termohon. Karena Pemohon telah mengubah substansi, baik Posita maupun Petitumnya.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Perbaikan Permohonan?

408. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Coba kita ... anukan ... di dalam PMK, "Pengajuan Permohonan pertama adalah 3 hari ... waktunya 3 hari dari hari penetapan suara dan penetapan rekapitulasi dan pengumuman."

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Baik, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Terus kemudian, boleh diperbaiki dalam waktu 3 hari setelah Permohonan yang pertama. Yang dipakai adalah Permohonan pertama.

Sekarang Permohonan yang tanggal 23 tadi, itu Perbaikan Permohonan yang pertama, kan?

412. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kenapa Anda mengatakan tidak boleh? Karena mengubah substansi? Padahal (...)

414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Baik Posita maupun Petitum Permohonannya, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, terus!

416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bisa kami lanjutkan, Yang Mulia?

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebelum perbaikan (...)

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pemohon mendalilkan dan menuntut agar Mahkamah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon. Namun dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Desember 2020, dalil dan ... dalil, Posita, dan Petitum tentang perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon tersebut dihilangkan oleh Pemohon.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu keberatan Anda, ya?

422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dicatat dalam risalah. Terus!

424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Begitu juga ... begitu juga dengan dalil Pemohon huruf b halaman 6 sampai halaman 11 sebelum perbaikan.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara di 15 TPS.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Namun dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Pemohon mengubah jumlah TPS menjadi 8 ... 18 TPS, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Begitu juga dengan Posita huruf c halaman 11 ... halaman 11 sebelum Perbaikan Permohonan. Pemohon mendalilkan terdapat di 19 TPS, ada pemilihan ... pemilih ganda. Namun dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember, Pemohon mengubah jumlah TPS menjadi 12 TPS, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Begitu juga dengan Petikum angka 5 dan angka 6 pada Permohonan sebelum perbaikan. Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 18 TPS. Namun setelah perbaikan, Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan perolehan suara di 30 TPS dan melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS tersebut.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Karena adanya perubahan-perubahan substansi yang demikian, maka menurut Termohon, Permohonan ... Perbaikan Permohonan Pemohon itu adalah termasuk Permohonan baru, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sebentar ... sebentar! Ya, ya. Nanti kita pertimbangkan, ya.

436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Baik, Yang Mulia.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita nilai nanti, mana yang benar antara Permohonan dan jawaban dari Termohon, ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, selanjutnya!

440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Kami ke dalam Eksepsi, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pertama bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus Permohonan Pemohon.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi pertama, Kewenangan?

444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Kewenangan Mahkamah.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dalam Permohonan Pemohon, keberatan Pemohon dibagi 3, Yang Mulia, yaitu:

1. Calon Bupati Nomor Urut 2 (...)

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana ini yang punya Saudara, yang mana? Itu yang pertama Eksepsinya mengatakan (...)

448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Kewenangan.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewengannya ... tidak punya kewenangan?

450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, ya.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ini didasarkan bahwa karena permohon ... dalil-dalil Permohonan Pemohon semua (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan berkaitan dengan pelanggaran (...)

454. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pada tahap-tahap ... tahapan dan proses pemilihan.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

456. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bukan tentang sengketa perolehan suara.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus yang kedua, Eksepsi tentang?

458. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa permo ... Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat terkait selisih 2%, Yang Mulia.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tidak memenuhi Pasal 158.

460. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya. Karena (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus berikutnya!

462. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Berikutnya adalah (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscur.

464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pengajuan Permohonan Pemohon telah lewat waktu sebagaimana tadi kami sampaikan, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Yang berikutnya adalah Permohonan Pemohon kabur. Pemohon ... karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Kedua. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas hubungan antara kejadian-kejadian pelanggaran yang diklaim sepihak oleh Pemohon dapat memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan yang dapat merugikan dan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

472. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dalil Pemohon juga tidak jelas dan bertentangan satu sama lain, yaitu pada dalil angka 3 huruf c halaman 24. Karena di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Namun di sisi lain, Pemohon mendalilkan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan menyatakan

Termohon melakukan tindak lanjut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 322 dan seterusnya.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Oleh karenanya, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah kabur, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, Pokok Permohonan!

476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan. Termohon menolak dalil Pemohon terkait penggantian pejabat secara besar-besaran di 30 ODP dan 22 distrik.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa keberatan kami ... penolakan kami adalah bahwa menurut Termohon, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi dalil keberatan Pemohon tersebut. Karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Termohon tidak pernah menerima pengaduan dan/atau keberatan dari Pemohon terkait penggantian pejabat di 30 ODP dan 22 distrik dimaksud.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

480. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Nomor 2.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus!

482. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara di 18 TPS dan di 12 TPS terkait pemilih ganda.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

484. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Karena dalil tersebut tidak benar dan bertentangan dengan catatan kejadian khusus saksi Pemohon atas nama Alif Permana. Dimana pada saat rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, Pemohon hanya mengajukan keberatan di 5 TPS. Jawaban ... dalam jawaban kami halaman 4 dan buktinya Bukti T-05, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa yang disampaikan keberatan oleh saksi Pemohon atas nama Alif Permana han ... tidak terkait hasil perolehan suara.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

488. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Namun terkait administrasi, Yang Mulia.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, dalil-dalil yang berkenaan dengan kekeliruan di TPS-TPS itu, gimana? Pada intinya semuanya ditolak?

490. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa Termohon ... Pemohon[Sic!] menolak semua pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon di 30 TPS.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

492. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Karena faktanya adalah saksi-saksi Pemohon pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS, saksi Pemohon semua mendatangi (...)

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanda tangan?

494. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

C Hasil, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

496. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dan tidak mengajukan keberatan, namun di TPS Inofina, Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon tidak mau menandatangani, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kenapa enggak mau tanda tangan katanya? Tahu enggak yang di satu TPS itu?

498. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Waktu itu saksi Pemohon sudah tidak ada di TPS, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tidak berada di TPS?

500. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dan di TPS 01 dan TPS 02 Menci tidak ada saksi kedua pasangan calon, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus setelah sampai ke tingkat kecamatan, rekap di kecamatan, ada persoalan?

502. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Tidak ada, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Di tingkat kabupaten?

504. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Di tingkat kabupaten tidak ada persoalan juga, Yang Mulia. Tadi seperti kami sampaikan bahwa saksi Pemohon atas nama Alif Permana hanya mempersoalkan terkait di 5 TPS, tetapi tidak terkait perolehan hasil suara, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

506. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Bahwa selanjutnya, kami juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan sepenuhnya rekomendasi Bawaslu. Karena faktanya, Termohon setelah menerima surat rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni, Termohon langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memerintahkan kepada penyelenggara PPD dan PPS se-Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan TPS mana saja 1.658 pemilih ganda sesuai Surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 312 dan seterusnya.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

508. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pemilih ganda meninggal dunia dan pemilih ... pindah pemilih dilakukan pencoretan pada Formulir A3. Formulir C Pemberitahuan tidak diserahkan dan ditahan oleh Termohon. Setelah Termohon melakukan rekomendasi Termohon ... Bawaslu, Termohon langsung menyerahkan hasil verifikasi dan pelaksanaan rekomendasi kepada Bawaslu Teluk

Bintuni dan juga kepada Pemohon. Dalam jawaban halaman 40, Bukti 81 sampai 89, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

510. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Pemohon ... Termohon juga menolak dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran 30 TPS sebagaimana tadi kami sampaikan, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, itu yang mulai di TPS-TPS yang di Meryedi dan seluruhnya itu, ya?

512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan hasil perhitungan perolehan suara yang benar versi Pemohon dan Pemohon juga tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang seharusnya menjadi pokok perkara dan yang menjadi kewenangan Mahkamah, serta Termohon ... Termohon menolak dalil Pemohon yang dikuatkan alat bukti, alat bukt-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, maka Termohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 adalah sah dan benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Prof. Saldi, ada? Silakan!

516. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara KPU atau Kuasanya, di halaman 13 itu, kan soal ... Eksepsi Saudara soal lewat waktu, ya. Pengajuan Permohonan Pemohon telah lewat waktu, ya, halaman 12.

517. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di poin 2 itu Anda mengatakan ... ini ditetapkan tanggal berapa?

519. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ditetapkan tanggal 17, Yang Mulia.

520. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

17 Desember, ya?

521. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Desember 2020.

522. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

17 Desember, berarti dihitung 17, 18, 21, ya?

523. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Ya, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hitungan masukkan Permohonan. Lalu Perbaiki Permohonannya masuk 23.

525. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

23.

526. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

21, 22, 23. Jadi, Anda mengatakan bahwa Perbaiki Permohonan itu berubah dibandingkan Permohonan awal, sehingga Anda mengatakan yang itu sudah lewat waktu, ya. Anda baca enggak hukum acara kami? Hukum acara Mahkamah Konstitusi?

527. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Kami baca, Yang Mulia. Tetapi kajian kami adalah bahwa Perbaiki Permohonan itu telah mengubah substansi.

528. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

529. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Dengan demikian, baik dalil Posita dan Petitumnya diubah, maka menurut hemat kami, itu adalah Permohonan yang baru, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, jadi (...)

531. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Karena ini Permohonan baru, maka (...)

532. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena itu ada perubahan substansi mengubah angka, mengubah Posita, mengubah Petitum, Saudara anggap itu Permohonan baru?

533. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Betul, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oleh karena itu dianggap Permohonan baru, sehingga dia menjadi lewat waktu, ya?

535. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Betul, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, saya mau klir itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita yang menilai.

538. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti Mahkamah yang menilai, ya.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi, Yang Mulia? Cukup. Baik.
Sekarang Pihak Terkait, silakan! Pokok-pokoknya saja!

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan keterangan, kami ada memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dimasukkan?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Sudah sebelum persidangan sudah kami serahkan, beserta softcopy-nya, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah.

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Eksepsi?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung masuk ke dalam Eksepsi.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Kedudukan Hukum. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yang a ... poin a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten.

Maka, Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 2%.

Jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan Dirjen Dirdukcapil yang tertera pada laman website adalah sebanyak 80.278 jiwa. Maka, untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil perhitungan suara ke Mahkamah, didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2%.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tidak memenuhi Pasal 158, ya?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus!

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan sua ... suara oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 300 dan seterusnya, maka Paslon Nomor 1 Ali Ibrahim Bauw-Yohanis Manibuy memperoleh suara sebesar 20.117 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Ir. Petrus Kasihw dan Matret Kokop memperoleh suara sebesar 21.153 suara.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya Permohonan ini tidak memenuhi Pasal 158?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang Anda sama (...)

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Sekarang kami mempertegas (...)

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua Anda sama dengan Pihak Termohon?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon (...)

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah mengubah susbtansi?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ini kami Pihak Terkait keberatan atas ... ini ... Perbaikan Pemohon pada saat sidang tanggal 24 (...)

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, yang pada sidang?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya hanya renvoi typo, tapi dia juga mengubah substansi?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul ... betul, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Mohon izin dibacakan, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ... ya, ini saya ... anu ... sudah ... sudah dianggap dibacakan saja itu.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Oke, baik.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Saudara ada keberatan perbaikan yang dibacakan pada waktu persidangan (...)

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Pada waktu Persidangan Pendahuluan, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Saudara tidak me ... apa ... masih tetap mengakui perbaikan itu?

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, betul.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi pada waktu di sidang (...)

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Sidang.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada perbaikan lagi (...)

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Tetapi mengubah (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menyangkut typo?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena mengubah substansi?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Substansi.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, lain lagi?

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terus Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak jelas, kabur.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Narasinya dianggap dibacakan.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Dalam Pokok Permohonan. Poin nomor 3. Bahwa telah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 300 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terus, mengenai dalil Pemohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Petahana melakukan pergantian pejabat.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Pemohon sebagai lapo ... laporan dengan Registrasi Nomor 017 dan seterusnya tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

Terus, oleh karena laporan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang intinya menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pidana.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Maka, beralasan hukum bagi Pihak Terkait menyatakan bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai pada tingkat ba ... Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga tidak tepat apabila dalil Pemohon ini dialamatkan kepada Mahkamah.

Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan Mahkamah.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Lanjut, apabila Pemohon tidak puas dengan keputusan Bawaslu, maka seharusnya Pemohon mengajukan banding terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni ke PTUN.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Sebagaimana dimaksud Pasal 15 ... Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Tujuh. Atas putusan Bawaslu tersebut, Pemohon tidak keberatan. Hal ini dapat diketahui bahwa sampai saat ini, yaitu sampai Permohonan Pemohon ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Lanjut, poin 9, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Bahwa Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut.

Yang a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

B. Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana dimaksud tidak menjelaskan secara spesifik definisi pejabat, namun demikian merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peraturan terkait pejabat di lingkungan pemerintahan daerah secara spesifik mengatur terkait pejabat struktural atau pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

C. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273 dan seterusnya tanggal 21 Januari 2020 hal menegaskan dan menjelaskan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Pada angka III terkait pergantian pejabat oleh kepala daerah yang di ... melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana dijelaskan di atas, mengatur bahwa (...)

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya saja sekarang, itu dianggap dibacakan.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Oke, baik, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Di angka 10 itu.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Di angka 10. Berdasarkan uraian dan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, penggantian bendahara, baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau bendahara pengeluaran pembantu yang

dilakukan oleh bupati atau wali kota, baik pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kondisi normal adalah merupakan kewenangan bupati, wali kota, dan sah, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut, dengan demikian, dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang yang dalil berikutnya?

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Dalil berikutnya.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, itu gimana menurut Saudara?

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia. Mengenai dalil Pemohon.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya, gimana?

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Intinya. Dalil Pemohon dalam memohon ... memohon ... Permohonannya yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara di TPS adalah tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah pemungutan suara di setiap TPS telah berjalan dan terlaksana dengan baik yang dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan diawali ... diawasi oleh Pengawasan Pemilihan Lapangan (PPL) dan dihadiri oleh masyarakat yang mempunyai hak suara di TPS tersebut.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus selanjutnya?

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terus Pemohon ... Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara di 30 TPS," akan tetapi tidak ada di 1 TPS pun diuraikan oleh Pemohon bahwa saksi mandat dari ... dari Pemohon yang membuat ... mengisi keberatan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK di setiap TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi disebutkan semua TPS itu ditandatangani, ya?

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecuali ada beberapa TPS yang tidak tadi, ya? KPU? Ya. betul, itu?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda sama dengan apa yang disampaikan Termohon mengenai hal itu?

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Lanjut. Yang adalah laporan pengaduan dari Pemohon kepada Bawaslu kabupaten tentang kejadian di TPS setelah pleno perhitungan hasil suara di TPS dan tingkat distrik telah selesai.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Begitu pun Pemohon tidak mencantumkan kapan tanggal pelaporan pengaduannya disampaikan kepada Bawaslu di Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga kami, Pihak Terkait, tidak dapat menanggapi masalah tenggang waktu pengaduan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Bahwa sesuai dalil Permohonan Pemohon, pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara, tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut.

TPS 01 Kampung Refideso, Distrik Kuri, untuk kutipan Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Karena keberatan dari Pemohon telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi atas nama Natalia Sayori yang juga istri dari pelapor.

B. Bahwa adanya anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai pengaman di lokasi TPS 1 Refideso, Distrik Kuri, juga tidak benar ditahan di Propam Polda Papua Barat atas kejadian seperti yang diuraikan oleh Pemohon.

C. Bahwa dalil tersebut mengada-ada karena pada saat pemungutan suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili di TPS 1 Refideso, Distrik Kuri, yang terdaftar di dalam DPT yang disaksikan oleh warga masyarakat, PPL, dan KPPS, dan tidak terdapat keberatan dari saksi mandat Pemohon sampai selesai perhitungan surat suara di TPS tersebut.

2. TPS 01 Kampung Sir dan TPS 01 Kampung Huss Distrik Dataran Beimes. Bahwa pada tanggal 8 Desember tahun 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, warga masyarakat yang bernama Simondan Siba yang tinggal di Kampung Horna melihat sebuah mobil dengan penumpang sebanyak 5 orang yang lewat di depan rumahnya dan berhenti. Kemudian, Simondan Siba menjumpai dan menyatakan maksud kedatangan orang tersebut. Ternyata orang-orang tersebut bukan penduduk Distrik Dataran Beimes, kemudian Simondan Siba dan masyarakat setempat menyarankan kepada orang-orang tersebut agar kembali ke Bintuni. Karena hukum adat setempat, jika orang baru yang tidak dikenal masuk ke kampung tersebut di malam hari, maka diwajibkan untuk kembali ke daerah tempat tinggalnya. Karena masyarakat setempat takut akan terjadi hal-hal yang buruk pada kampung mereka dan juga dikarenakan situasi masa Pandemi Covid-19. Dan kemudian, orang-orang tersebut meninggalkan Kampung Horna pergi ke Kampung Huss dan bermalam di salah satu rumah warga Kampung Huss. Maka dengan demikian, tidak benar adanya pengusiran saksi mandat Pemohon di TPS oleh Simondan Siba.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

b. Kemudian, tanggal 9 Desember tahun 2020, pukul 07.00 WIT, orang-orang tersebut mendatangi Rumah Kepala Kampung Huss dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk menjadi saksi mandat di komo ... dari Pemohon di TPS 01 Sir dan TPS 01 Huss. Kemudian, ke ... kepala kampung dan beberapa warga Kampung Huss keberatan atas maksud dan tujuan mereka sebagai saksi TPS karena sebelumnya Tim Sukses Pemohon telah merekrut masyarakat lokal sebagai saksi TPS di Dataran Beimes. Termasuk (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ... tidak benar itu, ya (...)

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Tidak benar, Yang Mulia (...)

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengusiran itu, ya? Baik. Dianggap dibacakan (...)

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Berikutnya (...)

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Narasi yang lain dianggap dibacakan.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Berikutnya TPS 01 Kampung Menci.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang itu ... yang TPS-TPS itu semuanya dianggap dibacakan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa?

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Kesimpulannya (...)

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa dalil-dalil yang berkenaan dengan TPS-TPS di kampung yang disebutkan itu, semuanya, bagaimana kesimpulannya?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Bahwa semua dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar, tidak berdasarkan menurut hukum.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Dan mohon ditolak, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Kita mas ... langsung ke halaman 42, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di angka 32 (...)

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi, kan sudah dibacakan.

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus sekarang 33.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

33?

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Pihak Terkait tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. 34.

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

34. Oleh karena Pihak Terkait telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil yang menjadi objek perkara yang da ... yang dapat

diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pihak Terkait tetap pada keputusan Termohon sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300 dan seterusnya (...)

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan itu tabelnya.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Oke.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT

35 sekarang.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

35. Oleh karena Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilaporkan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah dalam memutuskan sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Pemo ... Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau disti ... setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Petitum, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitumnya.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait. Ini ada sedikit renvoi, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan! Renvoinya typo, ya?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Typo.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Menyatakan Permohonan Pemohon ... seharusnya *Pemohon*, Yang Mulia.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan tetap Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember tahun 2020, pukul 16.45 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tertanda tangan Kuasa Hukum.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terima kasih, Yang Mulia.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia, ada? Cukup. Prof. Saldi? Silakan!

688. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kuasa Pihak Terkait, ya. Ini kalau saya lihat ini namanya ada 22 di halaman 2 itu. Tapi pe ... pe ... apa namanya ... keterangan Pihak Terkait cuma ditandatangani oleh 10 orang. Bagaimana penjelasannya itu?

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Untuk di ... di mana, Yang Mulia? C-1?

690. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apanya? Bukan, di sini, nama penerima kuasa itu 22.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, baik, Yang Mulia.

692. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di belakang tanda tangannya cuma 10, yang 12 lagi ke mana? Dan yang membacakan ini siapa ini sebetulnya sekarang?

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Saya, Yang Mulia, Rahmat Taufit, Yang Mulia.

694. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa? Nomor 8?

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Nomor 8, Yang Mulia.

696. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di sampingnya?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Di sampingnya, Derek Loupatty, nomor 10, Yang Mulia.

698. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 10. Nah, yang 12 tidak tanda tangan ini, ke mana orangnya ini?

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ada, Yang Mulia, tetapi kita hanya memasukkan nama-nama yang beberapa saja, Yang Mulia.

700. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kan kalau di sini 22, di sini ... apa ... 10 yang tanda tangan, 12 lagi itu, kan nanti lebih kecil honorinya dibanding yang lain.

Enggak, tapi ini kan Anda paham kan, kalau Permohonan begitu? Kalau ada nama segini, yang tanda tangan segini, yang mau dipedomani Mahkamah itu yang mana?

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia. Jadi, mungkin saya jelaskan sedikit, Yang Mulia.

702. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Untuk di Perkara 95/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Kuasa Pemohon, yaitu yang pertama Regginaldo Sultan, Parulian, Rahmat Taufit (...)

704. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba kita lihat yang tanda tangan, ya, siapa? Regginaldo Sultan, tanda tangan. Siapa lagi? Parulian, tanda tangan.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Parulian, Atang Irawan.

706. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Atang Irawan.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Rahmat Taufit, Derek Loupatty (...)

708. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Cosmas Refra.

710. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Zainuddin Patta.

712. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

La Ode Musrifin.

714. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terakhir, Mohamad Zen El, Yang Mulia.

716. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hermawi Taslim?

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, Hermawi Taslim termasuk, Yang Mullia.

718. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau begitu yang 12 lain yang tidak di situ, saya coret, ya?

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Baik, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah ini ... apa ... apa ... Pihak Terkait ini dicatat juga, kalau yang ndak masuk ini nanti honorinya enggak usah dikasih, begitu.
Terima kasih, Pak Ketua.

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Terima kasih, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi itu menerima Surat Kuasa semuanya?

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Menerima semua, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Mestinya tanda tangan itu, berarti enggak kerja. Enggak tanda tangan, kan enggak kerja berarti, kan?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Ya, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang baca itu yang dapat lebih banyak, ya? Ya. Biar enggak ... anu ini ... sudah waktunya mengantuk ini, makanya agak jokes sedikit, ya.

Sekarang Bawaslu, terakhir. Bawaslu, ini keterangannya agak banyak meskipun resumennya, tapi silakan dibacakan yang penting-penting saja.

727. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Siap.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tadi disinggung oleh ... tidak perlu urut, tapi meloncat yang penting-penting saja, yang lain dianggap dibacakan, ya? Silakan dipilih untuk yang penting-penting saja.

729. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Bawaslu!

731. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bawaslu. Kami langsung saja pada Pokok Permohonan yang telah diajukan.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

733. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang pertama, berkaitan dengan Pokok Permohonan nomor 1, sama perolehan suara hasil pengawasan itu 20.117 untuk Pasangan Nomor Urut 1.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu.

735. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Dianggap dibacakan. Yang berikut, Pokok Permohonan nomor 2 ... 2.1, 2.2, 2.3 kami akan bacakan pada jawaban selanjutnya karena substansinya dianggap sama.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

737. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut, ketiga, atas Pokok Permohonan huruf a pertama poin 1, 2, 3, 4, 5 yang berkaitan dengan petahana melakukan pergantian pejabat dalam kurung waktu 6 bulan sebelum penetapan calon, yang dilapor oleh Saudara Kasman Videoso. Kami Bawaslu Teluk Bintuni telah ... laporan tersebut merupakan ke Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni

dan telah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor, dan berpedoman pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan juga Surat Edaran Mendagri Nomor 271/ (suara tidak terdengar jelas) /SJ, maka berdasarkan hasil pembahasan penyelidikan Gakkumdu pada tanggal 26 November 2020, menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini kesimpulannya, ya?

739. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

741. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut, berkaitan dengan Pokok Permohonan nomor 3 huruf b kedua, poin 1, terkait dengan pencoblosan di TPS 1 Kampung Refideso, Distrik Kuri, yang dilakukan oleh ... yang dicoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2 oleh Saudara Robelus Batuta, Bawaslu telah menerima laporan (...)

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

743. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Dengan Laporan Nomor 024 (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di bawah itu kesimpulannya saja bahwa (...)

745. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Bahwa kami telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan juga saksi, kami sudah mengundang terlapor, pengawas PPS, KPPS, dan lain-lain, namun tidak hadir.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

747. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga berdasarkan hasil kajian Rapat Pleno Bawaslu Teluk Bintuni menyatakan bahwa syarat materi laporan belum terpenuhi dikarenakan kurangnya alat bukti.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

749. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sebagaimana dalam Bukti PK-3.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

751. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Hal yang sama juga masih berkaitan dengan Pokok Permohonan nomor 3 huruf b, kedua ... poin 1, terkait dengan hal yang sama karena pelapor membuat 2 laporan, 1 laporan diajukan ... kami lanjutkan ke Gakkumdu Teluk Bintuni. Gakkumdu juga telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan yang hadir hanya pelapor, terlapor, dan yang lain-lain tidak hadir (...)

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kesimpulannya?

753. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga hasil ... kesimpulannya tidak dilanjutkan ke tingkat ... tahapan penyidikan.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak dilanjutkan, ya.

755. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, 5?

757. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Berikut ... 5, berkaitan dengan nomor 3 huruf b, kedua ... poin kedua, Bawaslu pada hari Jumat, tanggal 11 tahun 2020 telah menerima laporan dari pelapor atas nama Agus Riyadi Sir ... Seran yang menyatakan diintimidasi oleh KPPS. Dan dalam hasil klarifikasi, kami peroleh informasi dari pelapor bahwa pelapor bukan diintimidasi oleh KPPS, tetapi oleh Saudara Simon Wasibel pada tanggal 8 Desember 2020.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2020.

759. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

761. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut masih kelanjutan dengan nomor 3, poin ke-2 tadi.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

763. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Terkait dengan Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 278/PB.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

765. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Tertanggal 12 Desember tahun 2020. Rekomendasi tersebut dilatarbelakangi oleh aksi demonstrasi yang terjadi sekitar dari ... sekitar pukul 13.00 WIT tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember sekitar pukul 07.00 WIT. Yang pada prinsipnya, meminta dilakukan PSU di TPS Kampung Huss dan TPS Kampung Sir.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kampung Huss dan TPS Kampung Sir, ya.

767. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Namun pada awalnya, berdasarkan hasil klarifikasi dilakukan terhadap pelapor Agus (suara tidak terdengar jelas) kami tidak menemukan unsur-unsur yang dijadikan dasar meluk ... melaksanakan PSU. Tetapi karena di bawah tekanan dan lain-lain, sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut dan rekomendasi tersebut diteruskan ke KPU Teluk Bintuni untuk melakukan PSU di Kampung Huss.

Yang berikut, masih berkelanjutan dengan huruf b ke ... b kedua poin di atas.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

769. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Berdasarkan rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak melaksanakan pemungutan suara ulang dan sebelumnya KPU telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU memberi jawaban atas rekomendasi, yang pada pokoknya KPU belum bisa melaksanakan pemungutan suara ulang dengan alasan unsur-unsur terkait pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2000 ... 2018 tidak terpenuhi. Hal ini didasari atas hasil klarifikasi

KPU terhadap PPD Distrik Dataran Beimes, PPS Kampung Huss, dan KPPS TPS Kampung Huss dan Kampung Sir.

Berdasarkan surat jawaban tersebut, Bawaslu menyikapi dengan Surat Nomor 296, yang pada prinsipnya menerima dan menghargai kajian-kajian hukum yang dilakukan oleh KPU Teluk Bintuni selaku lembaga penyelenggara terkait tidak dilaksanakannya PSU di Kampung Huss dan Kampung Sir.

Bahwa atas Pokok Permohonan huruf b poin 3, pada tanggal 11 Bawaslu juga menerima laporan dari Saudara Melyaki Diwan Siba, yang pada pokoknya melaporkan TPS Kampung Menci tidak memberikan hak memilih kepada pelapor.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terha ... hasil klarifikasi hasil penyelidikan terhadap pelapor kesim ... dalam Berita Acara disimpulkan bahwa laporan pelapor tidak bisa dilanjutkan ke tahapan penyidikan sebagaimana dalam Bukti PK-8.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena tidak terpenuhi unsur pidana?

771. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya, tidak terpenuhi unsur pidana.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

773. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut, pada Pokok Permohonan huruf 3 ... nomor 3, huruf b, poin 4. Bawaslu Teluk Bintuni tidak ... tidak menemukan adanya temuan pelanggaran maupun juga laporan dari pengawas TPS sebagaimana laporan pengawas TPS dalam form-form pengawasan yang disampaikan kepada Bawaslu.

Yang berikut pada nomor 3, huruf b, kedua, poin 5 terkait dengan pelapor atas nama Cornelis Isnak. Bawaslu telah meni ... menerima laporan terkait dugaan administrasi terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu telah mengundang pelapor, dalam laporan itu pelapor tidak menyatakan saksi dalam laporannya. Namun Bawaslu dalam meminta klarifikasi terhadap pelapor, namun pelapor juga tidak hadir, dan Bawaslu telu ... Bawaslu Teluk Bintuni juga telah berupaya meminta keterangan dari saksi yang bukan diajukan oleh pelapor, yaitu ... yakni saksi Ferdinan Orsomna, yang pada pokoknya saksi menyatakan tidak melihat pemilih memilih lebih dari 1 kali di TPS Inofina. Sehingga

berdasarkan hasil pembahasan Bawaslu, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukti p ... PK-10?

775. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Bukti PK-10.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

777. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya. Masih kelanjutannya bahwa atas Pokok Permohonan nomor 3, huruf b, kedua, poin 5. Bawaslu Teluk Bintuni juga telah menerima laporan dari pelapor atas nama Cornelis Isnak pada tanggal 11 Desember, yang pokoknya melaporkan terkait dugaan KPPS TPS 01 Inofina melakukan pencoblosan.

Bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti ke Gakkumdu Teluk Bintuni dan telah dilakukan klarifikasi awal terhadap pelapor. Dan pada saat klarifikasi, pelapor menyerahkan bukti video. Setelah diteliti oleh tim penyelidik terhadap bukti video rekaman tersebut, ternyata apa yang disampaikan pelapor tidak sama dengan apa yang dijadikan sebagai bukti video dan tidak menunjukkan adanya satu orang memilih lebih dari satu kali.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

779. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kedua Gakkumdu, laporan pelapor tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. 9!

781. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang ke-9. Bahwa untuk nomor 3, huruf b, kedua, poin 6. Pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama Jhon Felix Putnarubun, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pencoblosan di TPS 2 Taroi yang dilakukan bukan penduduk setempat.

Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap pelapor, pelapor juga tidak berada di tempat kejadian, dan pelapor hanya mendengar dari orang lain. Berdasarkan keterangan tersebut, Gakkumdu menyatakan bahwa laporan dengan Nomor Registrasi 025 tidak dilanjutkan ke tahapan penyidikan, sebagaimana dalam Bukti PK-12.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nomor 10!

783. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Nomor 10, berkaitan dengan Permohonan nomor 3, huruf b, kedua, poin 7. Pada tanggal 13 Desember, Bawaslu menerima laporan atas nama pelapor Ridwan Divideso, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan tiga anggota PPS TPS 03 Kelurahan Teluk Bintuni Timur ditolak untuk berada di TPS oleh KPPS tanpa keterangan dan alasan jelas.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini juga kesimpulannya, langsung saja!

785. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya, kesimpulannya (...)

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak memenuhi syarat materil?

787. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Tidak dilanjutkan karena Bawaslu mengundang pelapor, terlapor, semua tidak hadir.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

789. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut, nomor 3, huruf b, kedua, poin 8. Bawaslu juga pada tanggal 13 menerima laporan dari pelapor atas nama Abdul Samad Bouw, yang pokoknya melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS di TPS 21 (suara tidak terdengar jelas), Kampung Lama, Distrik Bintuni Timur, dan Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang mengintervensi proses di TPS. Bawaslu telah mengundang pelapor, namun tidak hadir. Saksi, namun tidak hadir. Yang hadir hanya terlapor dan menjelaskan bahwa kehadirannya di TPS tersebut mendampingi KPU provinsi dalam mengecek alat pelindung diri.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

791. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang berikut, atas Pokok Permohonan b kedua, poin 9, dan 10. Berdasarkan pengawasan TPS, tidak ada temuan dan laporan yang disampaikan.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

793. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sebagaimana Bukti PK-15 dan PK-16.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

795. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Bahwa atas Pokok Permohonan nomor 3, huruf b, kedua, poin 11. Pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Teluk Bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama Iwan, yang pada pokoknya melaporkan tentang Saudara Ali Saputra telah melakukan pencoblosan di TPS ... TPS 16 Bintuni Timur dan di TPS 15 Bintuni Timur. Bahwa setelah dilakukan

penyelidikan terhadap pelapor dan saksi yang diajukan pada tanggal 15 Desember, pada pokoknya pelapor dan saksi tidak melihat terlapor melakukan pencoblosan di TPS 15 setelah sebelumnya melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Bintuni Timur, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan.

Yang berikut berkaitan dengan poin nomor 3, huruf b, kedua, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, dan poin 17. Berdasarkan laporan pengawasan dan pengawas TPS masing-masing TPS sebagaimana dimaksud tidak adanya temuan dan laporan terkait adanya pelanggaran pada TPS tersebut.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... berhenti dulu di angka 15 ini. Ini saya tanya saja.

797. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU telah melaksanakan rekomendasi, itu dalam hal apa?

799. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Itu dalam hal laporan ... dalam hal laporan yang diajukan oleh Saudara Ramli.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

801. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Tentang adanya nama-nama ganda di dalam DPT.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian sudah dikoreksi oleh KPU?

803. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga laporan tersebut, kami Bawaslu mengundang KPU dan pihak pelapor untuk dikonfrontir datanya.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

805. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Dan benar ditemukan ada nama-nama ganda kurang-lebih ada 1.658.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1.658.

807. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sehingga berdasarkan bukti itu, kami rekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pengecekan terhadap nama-nama ganda itu (...)

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

809. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Dan menentukan di TPS mana pemilih tersebut akan mencoblos. Dan hal itu telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti sudah dibetulkan, ya?

811. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Sudah.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nomor 16 terakhir.

813. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Yang terakhir berkaitan dengan nomor 3, huruf c, ketiga, poin 1, 2, 3, sampai 11. Berdasarkan laporan pengawasan dari TPS masing-masing sehubungan yang dimaksud, pengawas TPS tidak menemukan adanya pelanggaran dan juga (...)

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menemukan, ya?

815. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Ya, tidak menemukan adanya pelanggaran dan juga Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menerima laporan adanya pelanggaran terkait hal tersebut.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Ada sedikit? Oke, silakan!

817. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini yang terakhir tadi, yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Pak Ketua. Ada 1.658 pemilih yang namanya ganda, itu, ya?

818. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Siap.

819. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, setelah direkomendasi oleh KPU dan dilaksanakan, kira-kira ini saya mau konfirmasi ke KPU juga ini. KPU, kira-kira bagaimana akhirnya permasalahan ini? Atau apa yang diperoleh setelah diteliti itu, ya? Namun, di sini ada pemilih ganda katanya. Sebetulnya itu, kan nama-nama yang dobel, ya, maksudnya, ya. Bukan pemilihan ganda, ya. Tolong dijelaskan dulu oleh KPU!

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, langsung saja, Prinsipal.

821. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Baik, terima kasih.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, ya. Itu DPT ganda atau pemilih ganda?

823. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

824. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu adalah DPT ganda.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPT ganda. Terus, habis itu dilakukan apa?

826. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Ya, kami melakukan verifikasi faktual secara langsung yang dilakukan oleh penyelenggara kami di tingkat distrik atau kecamatan untuk ini ... ganda-ganda ini, kan ada yang ganda antardistrik, kemudian ada yang ganda antar-TPS. Jadi, kami meminta kepada para penyelenggara di tingkat kecamatan atau tingkat distrik ini untuk menentukan, memastikan bahwa salah satu nama ini dia memilih di TPS mana. Sehingga, apabila dia memilih di TPS tertentu, maka ganda yang ada di TPS lainnya akan dicoret.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dicoret?

828. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dicoret?

829. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Seperti itu, Yang Mulia.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Semua sudah dilakukan verifikasi?

831. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Sudah, sudah, sudah kami laksanakan.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari sejumlah 1.500 lebih tadi?

833. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Benar, 1.500 (...)

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT

68?

835. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

1.568.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

837. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Nah, kemudian setelah kami coret, nama-nama yang telah dicoret tersebut kami menahan atau tidak menyerahkan C Pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Seperti itu, Yang Mulia.

838. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, terima kasih.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Yang Mulia?

840. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, cukup.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi C-6 nya setelah diketahui, ditentukan di TPS ini, maka yang di TPS ini dianggap tidak ada, dicoret.

842. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Dicoret.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus C-6 nya hanya disampaikan yang di sini?

844. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Benar, Yang Mulia.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di sini tidak disampaikan?

846. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Tidak disampaikan.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Semuanya sudah dicek dan diverifikasi yang 1.568 itu?

848. TERMOHON PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: EKO PRIYO UTOMO

Benar, sudah, Yang Mulia.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu, Bawaslu, betul, ya?

850. BAWASLU: DAUD DANIEL BALUBUN (KAB. TELUK BINTUNI)

Hal tersebut.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. KPU sudah melaksanakan itu, ya.

Kalau begitu, sekarang kita sudah sampai akhir dari persidangan ini. Saya akan mengesahkan bukti untuk Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-052?

852. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-102, betul?

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021: HANDRI PITER POAE

Betul, Yang Mulia.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-23? Ya.
Bukti untuk seluruh Pihak di Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021. Termohon T-1 sampai dengan T-136?

856. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: JUSTINUS TAMPUBOLON

Betul, Yang Mulia.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-30?

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT TAUFIT

Betul, Yang Mulia.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian dari Bawaslu Teluk Bintuni, PK-1 sampai dengan PK-36? Baik. Untuk seluruh Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Saya sampaikan kepada semua Pihak bahwa persidangan ini sementara selesai di sini, ya. Kemudian kita, Majelis Panel, ini akan melaporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim yang sifatnya tertutup, untuk menentukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pada hari yang pertama dan yang kedua ini, bagaimana tindak lanjutnya. Untuk kesempatan berikutnya, Para Pihak akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, bagaimana, apakah perkara ini akan dilanjutkan pada pemeriksaan ahli, atau saksi, atau bisa diselesaikan tanpa melanjutkan pemeriksaannya lagi, itu, ya. Bisa dimengerti? Cukup. Kalau begitu terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB

Jakarta, 3 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

